

DAFTAR PUSTAKA

- Afnan, D. (2019). Fungsi Humas Desa Sebagai Pengelola Informasi di Era Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Soshum Insentif*, Volume 2, Nomor 2. Diakses pada tanggal 7 April 2022 pukul 20.35 WIB.
- Aminah, S. dan Roikan. (2019). Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Asmara, R. (2016). Sistem Informasi Pengolahan Data Penanggulangan Bencana Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal J-Click*, Volume 3, Nomor 2. Diakses pada tanggal 7 April 2022 pukul 23:54 WIB.
- Ayuni, R.D. (2020). Masyarakat Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 5, Nomor 2. Diakses pada tanggal 27 Mei 2022 pukul 10gal 27 Mei 2022 pukul 10.30 WIB.
- Fathurrahman, M. (2016). Model-Model Perilaku Pencarian Informasi. *JIPJ Jurnal Ilmu Perpustakaan & Informasi*, Volume 1, Nomor 1. Diakses pada tanggal 24 Maret 2022 pukul 06.25 WIB.
- Firdaus, Lawati, S. (2019). Keterjangkauan Informasi Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, Volume 2, Nomor 1. Diakses pada tanggal 3 Mei 2022 pukul 23.19 WIB.
- Indah, T., Hariyanti, P. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jurnal Komunikasi*, Volume 12, Nomor 2. Diakses pada tanggal 4 Mei 2022 pukul 12.34 WIB.
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 tentang Kode Etik Hubungan Masyarakat Pemerintahan
- Lani, O.P., Handayani, B. (2021). Peranan Humas Pemerintahan (*Government Public Relations*) dalam Menciptakan Reputasi Pemerintahan yang Baik. *Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 9, Nomor 2. Diakses pada tanggal 24 Mei 2022 pukul 10.55 WIB.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
- Nugraha, A.R., Sjoraida, D.F., Novianti, E. (2022). Analisis Strategi Humas Pemerintahan Era Milenial dalam Menghadapi Tata Kelola Informasi Publik. *PROfesi Humas*. Volume 6, Nomor 2. Diakses pada tanggal 8 Mei 2022 pukul 20.06 WIB.

- Pandiangan, A., Indi, E.V. (2020). Kesesuaian Layanan Informasi Publik Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Di Tahun 2017-2018 Melalui Situs Dengan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2010. *Jurnal Hukum, Politik, dan Kekuasaan*. Volume 1, Nomor 1. Diakses pada tanggal 29 Juni 2022 pukul 08.42 WIB.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 144 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- PPID Diskominfo Jawa Timur. Laporan Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. <https://ppid.kominfo.jatimprov.go.id>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022
- Pratiwi, D.A., Fitriani, D.R. (2021). *Government Public Relations* Pada Diskominfo Kota Depok dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Untuk Mencapai *Good Governance*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 1, Nomor 2. Diakses pada tanggal 2 Mei 2022 pukul 23.58 WIB.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA)

- Suprawoto. (2018). *Government Public Relations: Perkembangan dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Rahmat, A., Bakti, I. (2016). Kinerja Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. *Jurnal Kajian Komunikasi*, Volume 4, Nomor 2. Diakses pada tanggal 18 April 2022 pukul 13.19 WIB.
- Tarjo. (2019). *Metode Penelitian Sistem 3X Baca*. Sleman: Deepublish.
- Ulandari, C.S., Fazri A. (2022). Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Simeulue Dalam Upaya Penyediaan Informasi Publik: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi*, Volume 2, Nomor 1. Diakses pada tanggal 14 Juni 2022 pukul 02.00 WIB.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Wardani, T.R.K., Suwignyo H., Ernarningsih, D.N. (2018). Kebutuhan Informasi dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Informasi Pada Komunitas Akar Tuli: *Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi*, Volume 2, Nomor 2. Diakses pada tanggal 7 Agustus 2022 pukul 19.41 WIB.

